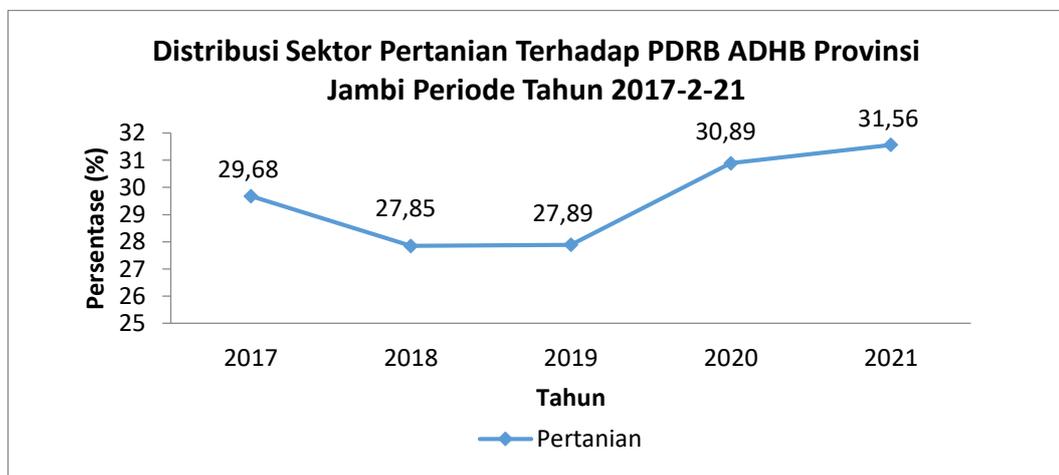


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian dalam arti luas merupakan salah satu sektor penting sebagai sumber pendapatan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Sektor pertanian terdiri dari berbagai subsektor yaitu subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian penduduk untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Distribusi sektor pertanian yang baik dapat memberikan kontribusi yang baik juga terhadap PDRB, baik dalam peningkatan produksi pertanian maupun dalam hal peningkatan nilai produk pertanian yang dihasilkan. Sektor pertanian memberikan distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) paling besar di Provinsi Jambi menurut lapangan usaha dibandingkan sektor lainnya.

Grafik 1. Distribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi Periode Tahun 2017-2021 (%)



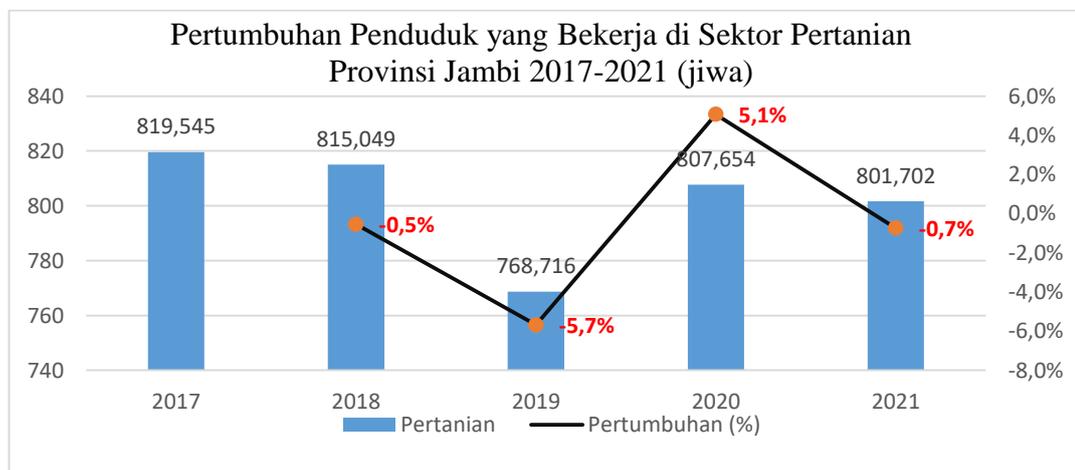
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Distribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB merupakan sektor terbesar di Provinsi Jambi, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan lapangan usaha sektor pertanian Provinsi Jambi, pada tahun 2017 sebesar 29,68%, pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 27,85% hal tersebut terjadi karena harga komoditas dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di pasar internasional mengalami

penurunan, pada tahun 2019 sebanyak 27,89%, selanjutnya pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebanyak 30,89%, selanjutnya pada tahun 2021 menjadi 31,56%. Distribusi sektor pertanian terhadap PDRB menjadi primadona di sektor produksi.

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis, disamping sebagai sumber penghasil devisa yang sangat besar, sektor pertanian juga merupakan sumber ekonomi bagi sebagian besar penduduk Indonesia, dan merupakan sektor yang paling banyak dalam penyerapan tenaga kerja (Bembok *et al.*, 2020). Tenaga kerja merupakan pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan proses produksi. Namun permasalahan pada tenaga kerja yakni pada minat pemuda yang menurun di sektor pertanian, sehingga pengolahan pada pertanian sering tidak optimal. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisional pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010).

Grafik 2. Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Periode 2017-2021 (jiwa)



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus (2021)

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya seperti industri pengolahan dan jasa. Hal ini menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Provinsi Jambi dan sektor pertanian memberikan alternatif dalam penyerapan tenaga kerja.

Sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, demi terciptanya kemandirian pembangunan wilayah (Ratnasari, 2014).

Salah satu subsektor yang penting dikembangkan dari sektor pertanian adalah subsektor perikanan, hal ini dilihat dari hasil produksi perikanan tangkap di Provinsi Jambi yang meningkat. Produksi hasil perikanan meliputi perikanan budidaya, perairan umum dan perikanan laut. Banyaknya produksi hasil perikanan yang unggulan adalah produksi perikanan laut

Grafik 3. Produksi Hasil Perikanan Tangkap Provinsi Jambi Tahun 2017-2021



Sumber: Statistik KKP, Produksi perikanan Provinsi Jambi (Ton)

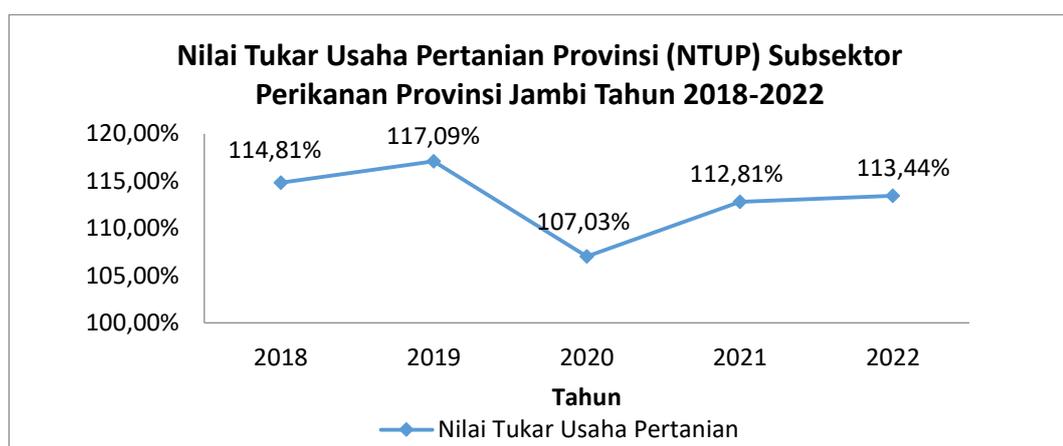
Berdasarkan Grafik 3, menyatakan bahwa hasil produksi perikanan laut pada tahun 2017 sampai 2021 mengalami hasil yang tidak stabil, dimana hasil produksi perikanan laut pada tahun 2017 sebanyak 44.134,00 Ton, selanjutnya pada tahun 2018 produksi perikanan laut mengalami peningkatan sebanyak 45.409,52 Ton, pada tahun 2019 produksi perikanan laut sebanyak 44,726,94 Ton hasil menunjukkan bahwa produksi menurun dari tahun sebelumnya, pada tahun berikutnya tahun 2020 hasil produksi kembali mengalami peningkatan yang paling banyak sejak tahun 2017 dengan hasil produksi perikanan laut sebanyak 47.489,28 Ton, terakhir pada tahun 2021 produksi perikanan sebanyak 46.342,71 Ton. Hasil dari produksi perikanan laut sebanyak 228.102,45 Ton.

Semakin tinggi produksi yang dihasilkan nelayan, maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh. Pendapatan yang dihasilkan nelayan sangat bergantung pada harga yang produksi, karena besar atau kecil pendapatan menentukan tingkat

kesejahteraan nelayan, salah satu parameter penentu kesejahteraan adalah Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Setiap nelayan pada dasarnya mengharapkan keberhasilan dalam usahanya, salah satu parameter yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha adalah tingkat keuntungan yang di peroleh dengan cara pemanfaatan faktor-faktor produksi efisien (Sudrajat dan Agus, 2018). Peningkatan harga jual perikanan mengakibatkan penerimaan pelaku usaha perikanan akan meningkat dan pendapatan yang di terima lebih besar (Welerubun *et al.*, 2016) besarnya surplus pendapatan subsektor perikanan dipengaruhi oleh pola permintaan nilai semua wilayah provinsi dan sistem perekonomian tertutup (Yulia *et al.*, 2015).

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan nelayan yaitu menggunakan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Indikator kesejahteraan petani salah satunya adalah peningkatan pendapatan rill petani. Dalam meningkatkan pendapatan rill petani sangat dipengaruhi oleh sarana produksi yang digunakan oleh petani dalam kegiatan pertanian mereka (Barusman *et al.*, 2021). NTUP adalah perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yang dinyatakan dalam persentase, dimana pada perhitungan NTUP hanya menggunakan Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebagai komponen Ib (BPS, 2016).

Grafik 4. Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi (NTUP) Subsektor Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2018-2022



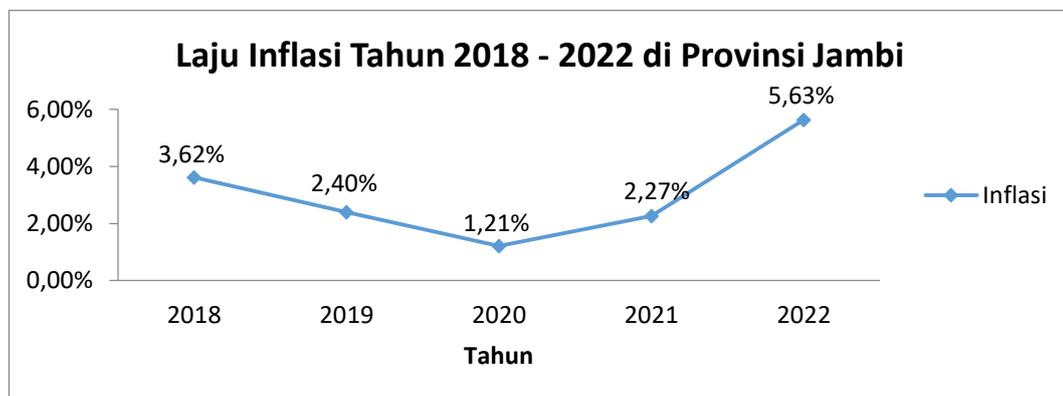
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jambi nilai tukar usaha pertanian (NTUP) tahun 2018 sampai 2022 mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2018 sampai

2019 nilai tukar usaha pertanian (NTUP) subsektor perikanan mengalami surplus, dimana kenaikan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 117,09%. Namun pada tahun 2020 nilai tukar usaha pertanian (NTUP) subsektor perikanan mengalami penurunan sebesar 107,03% ini menjadikan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) subsektor perikanan terendah sepanjang tahun 2018 sampai 2022, meski mengalami penurunan pada tahun 2020 NTUP subsektor perikanan masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan masih salah satu sektor unggulan di Provinsi Jambi. Rata-rata nilai NTUP subsektor perikanan sejak tahun 2018 sampai 2022 yaitu 112,44%.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor perikanan pada tahun 2022 nelayan mengalami peningkatan dalam arti nelayan dalam zona kesejahteraan, namun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor perikanan, seperti inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi merupakan suatu keadaan meningkatnya harga berulang-ulang, inflasi juga dapat memperburuk distribusi pendapatan karena meningkatnya harga biasanya seiring meningkatnya penghasilan yang menurunkan agregat pendapatan selanjutnya, terjadinya inflasi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik 5. Laju Inflasi Tahun 2018 – 2022 di Provinsi Jambi

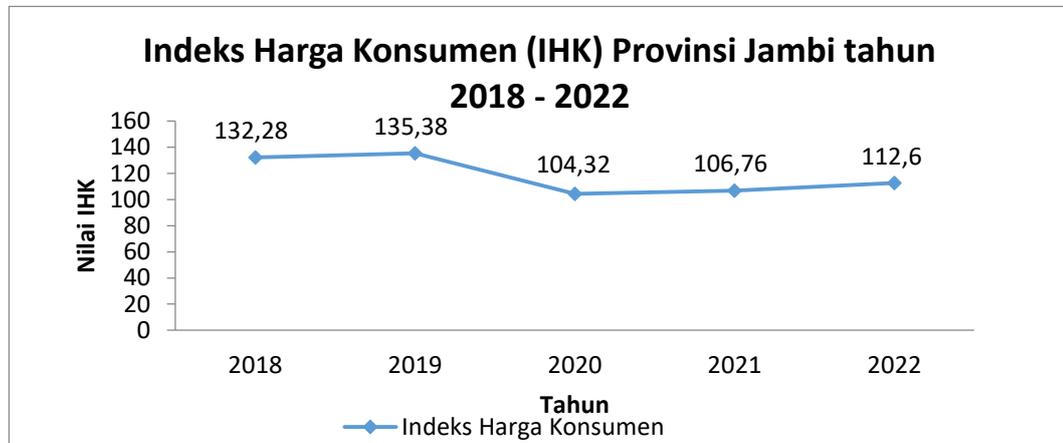


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, 2022

Sepanjang tahun 2018 sampai 2022 Provinsi Jambi mengalami inflasi yang meningkat, dimana inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,63%. Inflasi terendah pada tahun 2020 sebesar 1,21%. Berdasarkan inflasi dari tahun 2018 sampai 2022 rata-rata inflasi provinsi jambi sebesar 0,86%. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Jika Indeks Harga Konsumen menunjukkan kecenderungan naik dalam jangka waktu tertentu,

maka itu berarti inflasi, namun jika condong adalah turun maka terjadi deflasi dari barang dan jasa.

Grafik 6. Indek Harga Konsumen (IHK) Provinsi Jambi tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik ((BPS) Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan Tabel 3 Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2018 hingga 2022 menyatakan nilai indeks konsumen (IHK) terendah berada pada tahun 2020 sebesar 104,32 dan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 135,38. Rata-rata indeks harga konsumen (IHK) sepanjang tahun 2018 hingga 2022 di Provinsi Jambi sebesar 118,26.

Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul ‘Analisis Nilai Tukar Usaha Pertanian Subsektor Perikanan Di Provinsi Jambi Priode Tahun 2014-2022’.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Nilai Ttukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor perikanan tangkap di Provinsi Jambi selama periode tahun 2014-2022?
2. Bagaimana pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen (IHK) terhadap Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada subsektor perikanan tangkap di Provinsi Jambi selama periode tahun 2014-2022?

1.3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

1. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor perikanan di Provinsi Jambi periode tahun 2014-2022 mengalami peningkatan.
2. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor perikanan di Provinsi Jambi periode tahun 2014-2022 dipengaruhi oleh inflasi dan indeks harga konsumen.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan nilai tukar usaha pertanian subsektor perikanan (NTUP) di Provinsi Jambi selama periode tahun 2014-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen terhadap nilai tukar usaha pertanian (NTUP) pada subsektor perikanan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2014-2022.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat secara teori agar masyarakat dapat mengetahui perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh nelayan dengan indeks harga yang dibayar oleh nelayan sebagai pengetahuan yang ada di Provinsi Jambi.

1. Manfaat secara aplikasi untuk nelayan, diharapkan nelayan bisa menentukan barang yang dijual dengan harga sesuai dengan kebutuhan konsumen.
2. Bagi Pemerintah untuk membagi informasi sesuai dengan yang sudah diterapkan agar bisa menjaga kestabilan harga barang dan jasa komoditas/produk pertanian.
3. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai nilai tukar usaha pertanian di Provinsi Jambi.